



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : ANGGOTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANITA KADIR
2. Jabatan : ANGGOTA KOMISI YUDISIAL
3. NHK : 1000011

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **12.150.000.000**

1. Tanah Seluas 1.234 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 650.000.000
2. Tanah Seluas 3.236 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 14.880 m2/500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/151 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **3.003.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, LAND ROVER DEFENDER Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.662.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **312.403.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **17.127.903.000**

III. HUTANG **Rp.** **50.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **17.077.903.000**

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.